

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Teori Akuntansi

Teori Akuntansi merupakan suatu susunan konsep atau definisi yang menyajikan secara sistematis gambaran fenomena akuntansi dan menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel dalam struktur akuntansi dengan maksud agar dapat memprediksi fenomena yang akan muncul, (Hery, 2017:99).

Periodisasi teori akuntansi dapat dikelompokkan menjadi (Hery, 2017:104):

1. *Pre-Theory Period* (1492-1800)
Dalam periode ini belum ada teori akuntansi yang dirumuskan melainkan hanya sebatas pada saran-saran atau persyaratan yang tidak dapat dianggap sebagai teori.
2. *General Scientific Period* (1800-1955)
Dalam periode ini sudah ada pengembangan teori, namun hanya berupa penjelasan terhadap praktek akuntansi. Sudah terdapat kerangka kerja yang menjelaskan dan mengembangkan praktek akuntansi.
3. *Normative Period* (1956-1970)
Dalam periode ini perumusan teori akuntansi mulai mendefinisikan norma-norma atau praktek akuntansi yang baik dan pengembangan teori akuntansi yang lebih menekankan pada apa yang seharusnya. Akuntansi pada periode ini dianggap sebagai aturan yang harus diikuti.
4. *Specific Scientific Period* (1970-Sekarang)
Dalam periode ini disebut sebagai era positif dimana teori akuntansi tidak cukup hanya dengan berdasarkan normatif tetapi harus dapat diuji kebenarannya.

Terdapat beberapa fungsi teori akuntansi yaitu :

1. Sebagai pedoman bagi lembaga penyusunan standar akuntansi
2. Memberikan kerangka acuan dalam menyelesaikan masalah akuntansi yang tidak terdapat standar resminya
3. Meningkatkan pemahaman dan keyakinan pembaca terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
4. Agar laporan keuangan dapat diperbandingkan
5. Memberikan kerangka acuan dalam menilai prosedur dan praktek akuntansi.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disintesis bahwa Teori Akuntansi merupakan suatu konsep yang menjelaskan suatu fenomena secara sistematis tentang bagaimana hubungan antar variable dengan tujuan untuk memprediksi suatu fenomena yang muncul.

2.1.2 Teori Keagenan

Menurut Subekti dkk, (2015) teori keagenan (*agency theory*) merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama *principal* serta memberi kewenangan kepada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Hubungan antara *agency theory* dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang bertindak sebagai *agent* (pengelola pemerintahan) yang tidak hanya bertanggungjawab dalam penyajian kualitas laporan keuangan tetapi juga kemampuan *agent* dalam memberi akses terhadap pihak *principal* agar dapat memantau kinerja pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2018) dalam konsep teori agensi yang menyatakan akuntabilitas publik dapat diartikan kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*). Akuntabilitas dalam hubungan *agent* dan *principal* menjadi penting untuk menunjukkan bahwa *agent* telah melakukan sesuai dengan arahan *principal*.

2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, (Mardiasmo, 2018 : 27). Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal
Petanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
2. Akuntabilitas Horizontal

Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa dimensi. Terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur yang cepat. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berbiaya murah. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan jika dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain yang ditetapkan.
3. Akuntabilitas Program
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Sujarweni (2015:28), Akuntabilitas publik merupakan pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan segala kegiatannya yang menjadi kewajibannya kepada pihak pemberi amanah.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah yang dimaksud merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disintesakan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan daerah, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2.1.4 Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, (PP RI No. 71 Tahun 2010).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), (2012:5), Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan serta kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Adapun tujuan umum dari laporan keuangan tersebut untuk kepentingan umum yakni penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para pengguna. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Superdi (2017) penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif adalah salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disintesakan bahwa kualitas Penyajian laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

2.1.4.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut PP 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, seperti :

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan seperti :

a Memiliki Manfaat Umpan Balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b Memiliki Manfaat Prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

a Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.5 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

2.1.5.1 Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Menurut Peraturan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 232 menyatakan bahwa :

“Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer”.

Istilah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan istilah lama yang digunakan sebelum Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Istilah SAKD ini digunakan pada saat awal pasca reformasi. Seiring dengan perkembangan zaman dan adanya perubahan peraturan dari Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Permendagri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada

Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini masih terdapat jurnal terdahulu yang memakai istilah SAKD sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan istilah SAPD yang mengacu pada lampiran II Permendagri No. 64 tahun 2013.

Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) juga merupakan suatu instrumen penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi SAP berbasis akruaI.

Menurut Omar (2015: 5), sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Lily (2015: 5) mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disintesis bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur yang saling berhubungan disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

2.1.5.2 Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 disebutkan bahwa tujuan sistem akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi *double entry* melalui alat-alatnya seperti buku jurnal, buku besar, neraca saldo dan laporan keuangan itu sendiri. Sistem akuntansi pemerintah daerah juga memiliki sebuah indikator seperti kesesuaian dengan standar akuntansi

pemerintahan, prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan sistem akuntansi pemerintah daerah yang berlaku dan pembuatan laporan keuangan secara periodik.

2.1.5.3 Klasifikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013 pada lampiran II tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) dapat diuraikan menjadi dua subsistem yaitu sistem akuntansi PPKD dan sistem akuntansi SKPD yang dapat dijadikan panduan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah.

1. Sistem Akuntansi PPKD
 - a. Pencatatan Anggaran pada PPKD
 - b. Akuntansi Pendapatan PPKD
 - c. Akuntansi Belanja dan Beban PPKD
 - d. Akuntansi Aset PPKD
 - e. Akuntansi Kewajiban PPKD
 - f. Akuntansi Pembiayaan PPKD
 - g. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD
 - h. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo PPKD
 - i. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD
 - j. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Sistem Akuntansi SKPD
 - a. Pencatatan Anggaran pada SKPD
 - b. Akuntansi Pendapatan SKPD
 - c. Akuntansi Belanja dan Beban SKPD
 - d. Akuntansi Aset SKPD
 - e. Akuntansi Kewajiban SKPD
 - f. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPD
 - g. Jurnal, Buku Besar dan Neraca Saldo SKPD

2.1.5.4 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Untuk memberikan gambaran bentuk penyajian sistem akuntansi pemerintah daerah, dibawah ini diuraikan mengenai sistem akuntansi SKPD yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, yaitu:

1. Pencatatan Anggaran

Pencatatan anggaran pada SKPD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan SAL.
2. Akuntansi Pendapatan

Langkah teknis dalam akuntansi pendapatan menjelaskan urutan prosedur yang harus dilakukan oleh PPK SKPD dalam melakukan pencatatan transaksi pendapatan. Transaksi pendapatan SKPD merupakan pendapatan

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 3 Akuntansi Belanja dan beban
Dalam prosedur akuntansi beban SKPD terdapat pihak-pihak yang terkait yaitu Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 4 Akuntansi Aset
Dalam kasus pembelian aset tetap, berdasarkan bukti transaksi berupa Berita Acara Penerimaan Barang, PPK-SKPD akan membuat bukti memorial aset tetap yang kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran.
- 5 Akuntansi Kewajiban
Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, PPK-SKPD akan mengakui adanya utang/kewajiban akibat transaksi tersebut. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- 6 Jurnal Koreksi dan Penyesuaian
Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, PPK-SKPD akan membuat bukti memorial yang akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial yang telah diotorisasi, PPK-SKPD langsung membuat pembetulan atas jurnal yang salah catat tersebut. Apabila SKPD melakukan transaksi persediaan dengan pendekatan beban dan metode periodik, maka pada akhir periode sebelum menyusun laporan keuangan, secara rutin akan dilakukan stock opname setiap akhir periode untuk mengetahui sisa persediaan yang dimiliki.

2.1.6 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan bahwa:

Sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern juga diselenggarakan secara menyeluruh baik dilingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Mahmudi (2011:251), mengatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) merupakan bagian integral dari sistem akuntansi pemerintahan.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disintesis bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai berupa tindakan dan kegiatan secara terus-menerus guna mencapai tujuan organisasi, memberikan keyakinan memadai mengenai segala hal termasuk pencapaian keandalan informasi bagi manajemen dan dewan komisaris serta patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2.1.6.1 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Tujuan dibangunnya sistem pengendalian internal menurut Mahmudi (2011:252) adalah untuk :

1. Melindungi aset negara baik aset fisik maupun data
2. Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat
3. Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal
4. Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi
6. Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.6.2 Elemen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Elemen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan terdiri dari lima unsur yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan Pengendalian merupakan elemen terpenting yang melandasi unsur-unsur lainnya dalam sistem pengendalian. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan orang moralitas, integritas, kejujuran dan kompetensi. Pada prinsipnya pengendalian merupakan tone from the top, sehingga komitmen, peran, dan keterandalan dari pimpinan sangat penting. Oleh karena itu, pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi

yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat, melalui :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
 - b. Komitmen terhadap kompetensi
 - c. Kepemimpinan yang kondusif
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
 - g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
2. Penilaian Risiko
- Pengendalian internal harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan penilaian risiko dalam rangka tujuan instansi pemerintah yaitu dapat memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, terikat waktu dan wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Tujuan instansi pemerintah dapat terwujud apabila pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten, strategi manajemen terintegrasi, rencana penilaian risiko, dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan Pengendalian
- Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah telah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Informasi dan Komunikasi
- Informasi dan komunikasi pada dasarnya merupakan pendukung dari elemen sistem pengendalian internal lainnya. Manajemen dan karyawan dapat memperoleh informasi dan dapat berkomunikasi dengan atasan atau rekan kerjanya yang memungkinkan mereka memahami tugas dan tanggungjawab pengendalian secara baik. Selain itu informasi dan komunikasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa keluhan dari pelanggan segera diinformasikan dan dikomunikasikan ke pimpinan serta direspon dengan cepat. Pimpinan wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat serta efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, maka pimpinan harus sekurang-kurangnya :
- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
 - b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus.
5. Pemantauan
- Pemantauan dapat menilai kualitas kinerja dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal dengan melalui :

- a. Pemantauan berkelanjutan yang diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
- b. Evaluasi terpisah yang diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas terpisah ini dapat dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau pihak eksternal.
- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang telah ditetapkan.

2.1.6.3 Tanggung Jawab Pelaksanaan SPIP

Mahmudi (2011: 258), Tanggung jawab pelaksanaan sistem pengendalian internal terletak pada manajemen. Dalam organisasi pemerintahan, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern dilakukan melalui dua hal, yaitu:

- a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
- b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui : 1) audit, 2) revidu, 3), evaluasi, 4) pemantauan dan 5) kegiatan pengawasan lainnya.

Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), (Mahmudi, 2011 : 258) terdiri atas :

- a. BPKP
- b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern
- c. Inspektorat Provinsi atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern ditingkat Pemerintah Provinsi; dan
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern ditingkat Kabupaten/Kota.

BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi :

- a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral
- b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
- c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil dari beberapa peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Analisis yang digunakan	Hasil Penelitian
1	Firstcilia Eldy Putri Tahun 2017	Pengaruh Kualitas Penyajian laporan keuangan daerah, Aksesibilitas laporan	Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Peneliti menggunakan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan SPIP sebagai variabel	1. Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

		keuangan daerah dan tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel Independen: Kualitas Penyajian laporan keuangan	independen, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas laporan keuangan daerah dan tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan daerah sebagai variabel independen	2. Keuangan Daerah Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 3. tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Superdi Tahun 2017	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Siste Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel Dependen: Akuntabiitas Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Peneliti menggunakan Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan SPIP sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan Penyajian Laporan keuangan Aksesibilitas dan SAKD sebagai variabel independen	1. Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Aksesibilitas berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keu. Daerah 3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keu. Daerah
3	Embun Widya Sari	Pengaruh Sistem	Variabel Dependen:	Peneliti menggunakan	1. Sistem Pengendalian

	Tahun 2017	Pengendalian Intern, penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan gaya kepemimpinan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel independen : Sistem Pengendalian Intern	Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan SPIP sebagai variabel independen, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan sistem pengendalian intern, penyajian laporan keuangan, Aksesibilitas laporan keuangan dan gaya kepemimpinan sebagai variabel independen	Intern berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 2. Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 3. Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 4. Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
4	Abdus Somad Tahun 2016	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan	Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Peneliti menggunakan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan SPIP sebagai variabel	1. Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

		Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel Independen: Penyajian laporan keuangan	independen, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah sebagai variabel independen	Keuangan daerah 2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
5	Meilia Rozi, Ridwan Ibrahim, Syukriy Abdullah. Tahun 2017,	Pengaruh Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK), Keterampilan dan Pengawasan Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Independen: -	Peneliti menggunakan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan SPIP sebagai variabel independen, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK), Keterampilan dan Pengawasan Internal sebagai variabel independen	1. Pengetahuan PPK SKPK berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Keterampilan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Pengawasan Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
6	Christy Natalia Lewier, Ch. Heni Kurniawan. (2016)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Independen: -	Peneliti menggunakan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan SPIP sebagai variabel independen, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas	1. Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

				Laporan Keuangan Daerah sebagai variabel independen	berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
7	Hafzan Fikrian, Tahun 2017	Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Independen: Kualitas Laporan Keuangan	Peneliti menggunakan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan SPIP sebagai variabel independen, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan sebagai variabel independen	1. Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Aksesibilitas Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
8	Amalian Citra Dewi, Tahun 2018	Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Independen: Penyajian Laporan Keuangan	Peneliti menggunakan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan SPIP sebagai variabel independen, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan,	1 Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 2 Aksesibilitas Laporan Keuangan Berpengaruh

				aksesibilitas laporan keuangan sebagai variabel independen	Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
9	Nur Azizah, Junaidi dan Achdiar Redy Setiawan (2014)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel Dependen: Akuntabiitas Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Independen: Penyajian, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Peneliti menggunakan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan SPIP sebagai variabel independen, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan Penyajian, aksesibilitas, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variabel independen	1 Penyajian Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 2 Aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh terhadap transparansi akuntabilitas pengelolaan daerah
10	Pancawati Hardiningsih, Rachmawati Meita O, Ceacilia Srimindarti dan Ida Kristiana Aktsar Tahun 2019	Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel Dependen: Akuntabiitas Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Independen: Laporan Keuangan, Sistem	Peneliti menggunakan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pemerintah Keuangan Daerah dan SPIP sebagai variabel independen, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan Laporan Keuangan,	1 Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 2 Value for money tidak berpengaruh terhadap

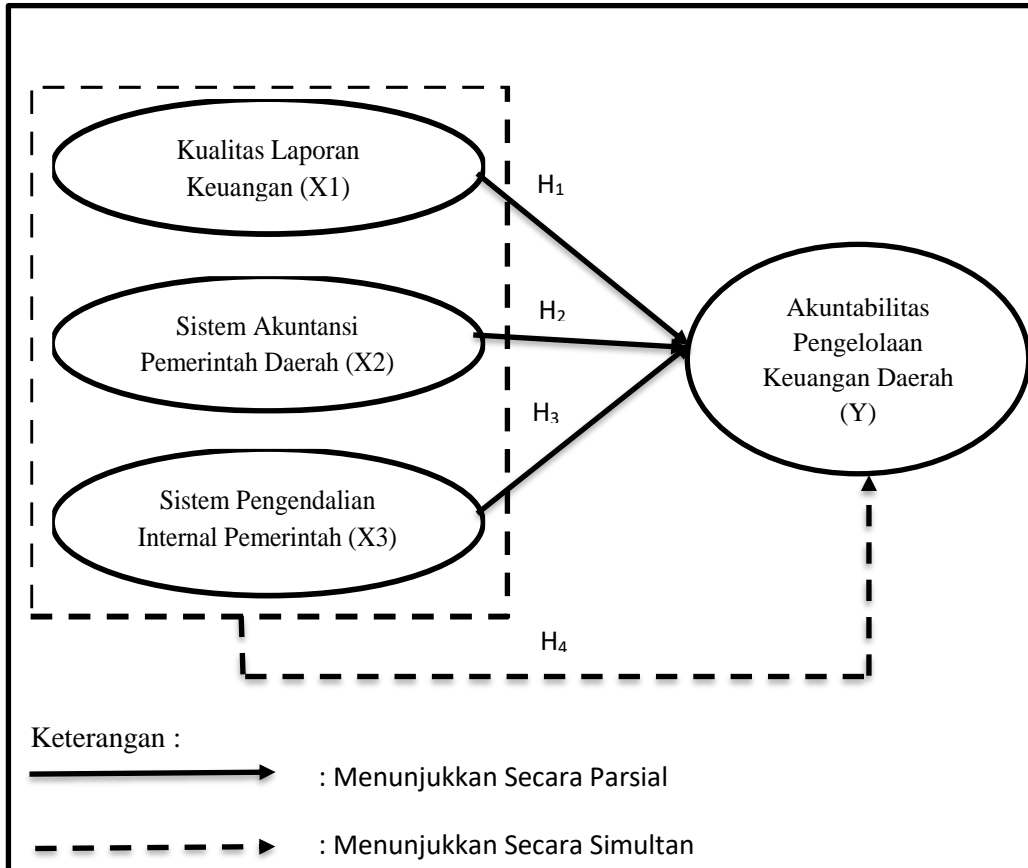
			Pengendalian Internal.	Value for money, Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel independen	akuntabilitas pengelolaan keuangan 3 Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
11	Hasanah Tisna Amijaya. (2019)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akantabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan <i>Good Government Governance</i> sebagai variabel intervening	Variabel Dependen: Akuntabiitas Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Peneliti menggunakan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan SPIP sebagai variabel independen, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel independen	1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
12	Ika Arifanny Subekti, Fahmi Rizani, Rifqi Novriyandana. (2015)	Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah	Variabel Dependen: Akuntabiitas Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Independen: Kualitas Penyajian Laporan Keuangan	Peneliti menggunakan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan SPIP sebagai variabel independen, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan sebagai variabel independen	1 Kualitas Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah 2 Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

					Keuangan Pemerintah
13	Lily (2015)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Peneliti menggunakan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan SPIP sebagai variabel independen, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan dan Aksesibilitas sebagai variabel independen	1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Aksesibilitas Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2020)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini dapat ditunjukkan oleh model gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar tersebut, maka peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis dan mengukur sejauh mana pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Musi Banyuasin.

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019 : 99) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan konsep teori dan paradigma diatas, maka dapat ditentukan hipotesis dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kualitas laporan keuangan daerah yang dikendaki akan terwujud apabila memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya. Penelitian yang dilakukan oleh Fikrian (2017) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dimana semakin baik kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, maka akan semakin berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dapat diajukan yaitu:

H₁ : Kualitas Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan suatu instrumen penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 disebutkan bahwa tujuan sistem akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi *double entry* melalui alat-alatnya seperti buku jurnal, buku besar, neraca saldo dan laporan keuangan itu sendiri. Menurut penelitian Lily (2015), akuntabilitas terbentuk dalam sebuah laporan keuangan pemerintah daerah dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang maka perlu untuk melakukan

berbagai kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, menunjang pemda dalam menghasilkan pertanggungjawaban keuangan daerah maka harus dikembangkan dan disusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang tepat.

H₂ : Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem pengendalian intern (SPI) adalah suatu proses yang integral pada tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan, dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008). Sistem pengendalian intern tersebut berguna untuk mengendalikan kegiatan pemerintahan, dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara/daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga SPIP diyakini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah, sehingga semakin tinggi penerapan SPI akan meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Atas dasar tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Semakin baik kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, maka akan semakin berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif.

Sistem pengendalian intern tersebut berguna untuk mengendalikan kegiatan pemerintahan, dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara/daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikrian (2017), menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Superdi (2017) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah juga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hardiningsih dkk (2019) menyatakan SPIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Atas dasar tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄ : Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.